

Kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Jepang: Implikasinya Terhadap Keamanan Maritim Indonesia

Nadirah¹, Yusuf Nirendra Oracle^{1*},

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Corresponding email: yusufnirendraoracle@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) policy on Indonesia's maritime security. The research adopts a qualitative descriptive method, utilizing document-based analysis through literature review of official records, academic journals, books, and reports from international organizations. The theoretical framework draws on liberalism in international cooperation and world-systems theory to understand maritime security dynamics in the Indo-Pacific region. The findings indicate that Japan's implementation of FOIP through defense cooperation, maritime security training, patrol vessel assistance, and multilateral diplomacy has significantly enhanced Indonesia's maritime surveillance, law enforcement capabilities, and protection of major sea lines of communication. Moreover, FOIP strengthens the observance of international maritime law and supports Indonesia's position in addressing non-traditional security threats. Thus, FOIP has positively contributed to Indonesia's maritime security through strategic bilateral and regional collaboration.

Keywords: *Free and Open Indo-Pacific, Japan, maritime security, bilateral cooperation, Indo-Pacific*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diinisiasi oleh Jepang terhadap keamanan maritim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku ilmiah, jurnal akademik, dan laporan organisasi internasional. Kerangka teoritis penelitian mengacu pada pendekatan liberalisme dalam kerja sama internasional dan teori sistem dunia untuk memahami dinamika keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi FOIP oleh Jepang melalui kerja sama pertahanan, pelatihan keamanan maritim, bantuan kapal patroli, dan diplomasi multilateral memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas pengawasan laut, penegakan hukum, dan perlindungan jalur pelayaran utama Indonesia. Selain itu, FOIP memperkuat penghormatan terhadap hukum laut internasional dan mendukung posisi Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. Dengan demikian, kebijakan FOIP berdampak positif terhadap penguatan keamanan maritim Indonesia melalui kolaborasi strategis bilateral dan regional.

Kata Kunci: *FOIP, Jepang, keamanan maritim, kerja sama bilateral, Indo-Pasifik*

PENDAHULUAN

Indo-Pasifik telah berkembang menjadi kawasan strategis dalam tatanan global kontemporer karena posisinya yang menghubungkan dua samudra utama serta jalur pelayaran tersibuk di dunia. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan rivalitas geopolitik, kawasan ini

menjadi pusat persaingan kekuatan besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, muncul berbagai inisiatif strategis dari negara-negara utama untuk mempertahankan stabilitas kawasan dan memastikan kebebasan navigasi, salah satunya adalah kebijakan Free and Open

Indo-Pacific (FOIP) yang diperkenalkan oleh Jepang.

FOIP merupakan konsep strategis Jepang yang pertama kali diartikulasikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2016 dalam pidatonya di Nairobi, Kenya. Inisiatif ini menekankan pentingnya supremasi hukum, kebebasan navigasi, kerja sama ekonomi yang inklusif, serta penguatan konektivitas antar kawasan. Secara prinsip, FOIP bertujuan menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan internasional, khususnya hukum laut internasional. Jepang menegaskan bahwa pendekatan ini bersifat inklusif dan tidak ditujukan untuk menghadapi kekuatan tertentu, meskipun secara implisit merupakan respons terhadap ekspansi maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan dan sekitarnya.

Bagi Indonesia, FOIP memiliki implikasi strategis, mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jantung kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara poros maritim dunia, keamanan maritim Indonesia berkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan keterjaminan jalur pelayaran internasional. Kerja sama Indonesia–Jepang dalam kerangka FOIP mencakup pelatihan keamanan maritim, bantuan kapal patroli, penguatan kapasitas aparat penegak hukum laut, serta kerja sama diplomatik dalam forum multilateral seperti ASEAN dan East Asia Summit (EAS).

Namun demikian, terdapat pula tantangan dalam implementasi FOIP di Indonesia, seperti keterbatasan kapasitas institusional, perbedaan prioritas antara negara mitra, serta sensitivitas terhadap isu kedaulatan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana FOIP berkontribusi terhadap keamanan maritim Indonesia, baik dari segi

manfaat praktis maupun kesesuaiannya dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan kerja sama kawasan.

Tulisan ini terdiri atas lima bagian utama. Bagian pertama menguraikan latar belakang dan relevansi isu yang dikaji. Bagian kedua menjelaskan kerangka teori yang digunakan. Bagian ketiga menyajikan metodologi penelitian. Bagian keempat memaparkan hasil dan pembahasan. Terakhir, bagian kelima menyimpulkan temuan utama dan memberikan refleksi terhadap kontribusi FOIP dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan tiga tingkat pendekatan teoritis yang saling melengkapi untuk memahami dan menganalisis kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) Jepang serta implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia. Pendekatan tersebut mencakup teori besar (*grand theory*) sebagai landasan ontologis dan epistemologis, teori menengah (*middle-range theory*) untuk menjembatani isu tematik, serta teori terapan (*applied theory*) sebagai alat analisis terhadap dinamika kasus secara konkret. Pendekatan berlapis ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman menyeluruh, mulai dari fondasi filosofis hingga aplikasi kebijakan di lapangan.

Pertama, sebagai *grand theory*, digunakan pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa negara bukanlah aktor yang semata-mata bertindak atas dasar kepentingan kekuasaan dan keamanan sempit sebagaimana diasumsikan dalam realisme, tetapi juga mampu menjalin kerja sama yang saling menguntungkan

dalam kerangka institusional dan normatif (Dugis, 2016; Rosyidin, 2020). Ontologinya berangkat dari pandangan bahwa sistem internasional tidak sepenuhnya anarkis karena dapat dimediasi oleh norma, hukum internasional, dan institusi seperti ASEAN, IORA, dan PBB. Epistemologinya mendukung metode analisis rasional-institusional, yaitu penekanan pada insentif, aturan, dan struktur kerja sama.

Liberalisme sangat relevan dalam menjelaskan FOIP sebagai kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan prinsip rule-based order, keterbukaan ekonomi, supremasi hukum laut, serta penghormatan terhadap norma internasional. FOIP tidak dirancang sebagai aliansi militer, tetapi sebagai kerangka kerja sama inklusif yang menolak dominasi satu kekuatan dan mendorong keterlibatan multipihak dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Dengan demikian, FOIP mencerminkan paradigma liberal tentang tatanan dunia yang dapat dikelola melalui kolaborasi antarnegara berdasarkan nilai bersama.

Kedua, sebagai *middle-range theory*, digunakan teori kerja sama internasional. Teori ini berfokus pada mekanisme dan insentif yang memungkinkan negara-negara dengan kepentingan berbeda untuk membentuk kerja sama dalam bidang tertentu (Charles & Joseph, 2007; Chatterjee, 2010). Kerja sama internasional dalam konteks FOIP mencakup pelatihan keamanan maritim, diplomasi pertahanan, transfer teknologi pengawasan laut, dan bantuan logistik seperti hibah kapal patroli.

Teori kerja sama internasional menjelaskan bahwa negara tidak akan selalu bertindak unilateral, melainkan dapat membentuk kolaborasi apabila terdapat persepsi keuntungan bersama,

biaya rendah, serta mekanisme kepercayaan (trust-building mechanisms). Dalam hal ini, Jepang memandang Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara untuk menjaga kestabilan rute perdagangan laut, sementara Indonesia memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat kapasitas sektor pertahanannya tanpa menimbulkan ketegangan dengan kekuatan besar lain. Kerangka ini menjadi jembatan konseptual antara norma liberal dengan isu spesifik kerja sama keamanan maritim.

Ketiga, sebagai *applied theory*, digunakan teori keamanan maritim. Teori ini membahas bagaimana negara-negara merespons ancaman terhadap kepentingan maritim nasional mereka, baik yang bersifat tradisional seperti konflik teritorial, maupun non-tradisional seperti perompakan, penyelundupan, pelanggaran IUU fishing, dan degradasi lingkungan laut (Yusron & Mukti, 2020; Rahmi, 2021). Teori ini berfokus pada dimensi praktis dari keamanan, termasuk pembangunan kapasitas penjaga laut, penggunaan teknologi pemantauan, serta penguatan rezim hukum maritim seperti UNCLOS.

Dalam konteks FOIP, teori ini memungkinkan analisis terhadap efektivitas bantuan Jepang dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis. Bantuan hibah kapal patroli dari Jepang, pelatihan Coast Guard, serta peningkatan interoperabilitas melalui latihan bersama menunjukkan bahwa FOIP bukan hanya wacana strategis, tetapi memiliki manifestasi konkret di level taktis-operasional. Dengan demikian, teori keamanan maritim memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi kontribusi FOIP terhadap kedaulatan, keamanan lintas batas, dan pengelolaan kawasan laut Indonesia.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menjelaskan FOIP dari sisi normatif dan sistemik, tetapi juga menilai efektivitasnya secara empiris dalam konteks keamanan maritim Indonesia. Pendekatan liberalisme menjelaskan mengapa Jepang mendorong FOIP; teori kerja sama internasional menjelaskan bagaimana kemitraan dengan Indonesia terbentuk; dan teori keamanan maritim digunakan untuk mengukur hasil kebijakan tersebut di lapangan. Struktur teoritis berlapis ini memberikan fondasi konseptual yang kuat dan terintegrasi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Jepang serta implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan luar negeri dan kerja sama bilateral melalui penelaahan terhadap narasi, kebijakan resmi, serta konteks strategis yang melatarbelakangi hubungan Indonesia–Jepang. Penelitian kualitatif bertujuan tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menginterpretasi makna di balik kebijakan dan tindakan negara melalui analisis data non-numerik seperti dokumen, wacana, dan interaksi diplomatik (Creswell, 2016).

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel. Sumber data meliputi dokumen resmi dari pemerintah Indonesia dan Jepang, laporan kebijakan

luar negeri, publikasi dari organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, artikel jurnal akademik, serta berita dari media daring yang terpercaya. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau survei langsung, tetapi mengandalkan sumber sekunder yang terdokumentasi untuk menghasilkan analisis interpretatif terhadap implementasi FOIP dan pengaruhnya terhadap sektor keamanan maritim.

Sumber data utama dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, sumber dokumen resmi, seperti siaran pers Kementerian Luar Negeri Jepang dan Indonesia, laporan tahunan Kementerian Pertahanan, serta naskah perjanjian atau nota diplomatik yang terkait dengan kerja sama Indo-Pasifik. Kedua, literatur akademik, termasuk buku dan jurnal yang mengkaji teori liberalisme, kerja sama internasional, dan keamanan maritim. Ketiga, laporan media daring dan think-tank, seperti Japan Times, CSIS, dan The Diplomat, yang memberikan gambaran terkini tentang perkembangan FOIP dan respons regional terhadapnya. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi, akurasi, dan kredibilitas akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses seleksi, klasifikasi, dan interpretasi dokumen tertulis secara sistematis. Dokumen-dokumen dikumpulkan dari basis data daring seperti Google Scholar, Perpustakaan Nasional RI, JSTOR, dan situs kementerian terkait. Peneliti kemudian melakukan seleksi terhadap dokumen yang secara langsung berkaitan dengan FOIP, kerja sama Indonesia–Jepang, serta isu keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content*

analysis), yaitu metode untuk mengekstraksi makna tematik dari dokumen tertulis berdasarkan kategori teoritis tertentu. Kategori tersebut disusun berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu liberalisme, kerja sama internasional, dan keamanan maritim. Setiap dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi narasi kebijakan, tujuan strategis, dan indikator keberhasilan kerja sama FOIP yang berkaitan langsung dengan keamanan maritim Indonesia.

Analisis dilakukan secara tematik, dibagi menjadi tiga dimensi utama sesuai dengan kerangka teori terapan (*applied theory*), yaitu: (1) peningkatan kapasitas keamanan maritim Indonesia, (2) penguatan kerja sama bilateral dan regional, serta (3) kontribusi terhadap tatanan Indo-Pasifik yang berbasis aturan. Masing-masing dimensi dianalisis berdasarkan data empirik yang ditemukan dalam dokumen-dokumen yang ditelaah. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk menguji apakah FOIP telah menghasilkan perubahan konkret dalam konteks keamanan maritim Indonesia.

Dalam memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai jenis sumber, seperti dokumen pemerintah, publikasi akademik, dan laporan media. Selain itu, peneliti juga memastikan konsistensi antar dokumen, kesesuaian narasi dengan peristiwa aktual, serta referensi silang terhadap sumber yang berbeda untuk menghindari bias interpretasi.

Pemilihan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka sangat relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji kebijakan luar negeri Jepang yang bersifat kompleks, dinamis, dan

multidimensi. Dengan mendasarkan analisis pada dokumen-dokumen resmi dan literatur ilmiah, peneliti dapat menyusun argumen berbasis data yang kuat dan terverifikasi. Selain itu, penggunaan teori sebagai alat kategorisasi dalam analisis memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemetaan yang sistematis mengenai peran FOIP dalam memperkuat arsitektur keamanan maritim Indonesia.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) Jepang dalam kaitannya dengan keamanan maritim Indonesia dilakukan dengan menggunakan teori keamanan maritim sebagai kerangka terapan. Teori ini memfokuskan perhatian pada tiga dimensi utama: (1) peningkatan kapasitas pengamanan laut dan penjagaan wilayah yurisdiksi; (2) penguatan kerja sama keamanan bilateral dan regional; serta (3) dukungan terhadap penegakan hukum dan keterlibatan Indonesia dalam rezim hukum laut internasional. Masing-masing dimensi dianalisis untuk menilai kontribusi FOIP dalam memperkuat sistem keamanan maritim nasional Indonesia secara konkret.

Peningkatan Kapasitas Pengamanan Maritim Indonesia

Salah satu dampak paling nyata dari kerja sama FOIP Jepang terhadap Indonesia adalah dalam aspek penguatan kapasitas pengamanan laut. Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), secara konsisten memberikan dukungan logistik dan pelatihan bagi aparat keamanan laut Indonesia, termasuk TNI AL dan

Bakamla. Salah satu bentuk konkret dari dukungan ini adalah pemberian kapal patroli cepat dan bantuan teknis untuk pemantauan perairan strategis, seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

Sebagai contoh, pada tahun 2020 dan 2022, Jepang memberikan bantuan kapal patroli baru kepada Indonesia melalui program hibah untuk penguatan pengawasan zona ekonomi eksklusif. Bantuan ini dilengkapi dengan peralatan navigasi mutakhir dan sistem radar pengawasan laut (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2022). Dalam konteks keamanan maritim, kehadiran kapal patroli ini memiliki arti strategis, karena memperkuat kemampuan Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran wilayah, penyelundupan, perompakan, serta aktivitas ilegal lainnya di laut.

Selain dari sisi logistik, FOIP juga berkontribusi dalam bentuk pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas personel. Pemerintah Jepang melalui Japan Coast Guard dan JICA menyelenggarakan berbagai pelatihan di bidang navigasi, hukum laut, teknik penyelamatan laut (*maritime rescue operations*), serta penanganan kejahatan lintas batas. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis aparat keamanan laut Indonesia, tetapi juga memperkuat interoperabilitas dan keselarasan standar operasional antar institusi penjaga laut di kawasan Indo-Pasifik.

FOIP berperan strategis dalam mentransformasi pendekatan Indonesia terhadap keamanan maritim dari berbasis reaktif menjadi proaktif, dengan menekankan aspek pencegahan, deteksi dini, dan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan kebijakan kelautan

Indonesia (Kementerian Koordinator Kemaritiman, 2020).

Penguatan Kerja Sama Keamanan Bilateral dan Regional

Dimensi kedua dari kontribusi FOIP terhadap keamanan maritim Indonesia terletak pada penguatan jejaring kerja sama bilateral dan regional. Jepang secara aktif membangun arsitektur keamanan di kawasan Indo-Pasifik melalui pendekatan kolaboratif, yang menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dalam strategi maritim kawasan. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, posisi geografis Indonesia sangat vital dalam mendukung terciptanya kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Melalui FOIP, Jepang mendorong pembentukan forum dialog dan kerja sama keamanan laut, seperti Japan-Indonesia Maritime Forum, serta memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus), dan East Asia Summit. Dalam forum-forum ini, Jepang mengangkat isu keamanan non-tradisional seperti kejahatan lintas batas, pencurian ikan (*illegal, unreported, and unregulated fishing*), dan bencana alam laut, yang juga menjadi fokus kebijakan maritim Indonesia.

Kerja sama ini memberikan efek pengganda terhadap kapasitas diplomatik dan operasional Indonesia, karena membuka akses terhadap intelijen maritim, teknologi pengawasan, dan skema latihan gabungan (*joint exercises*) yang memperkuat keterpaduan regional. FOIP juga mendorong harmonisasi kebijakan keamanan maritim antara Indonesia dan negara mitra lain seperti Australia, India,

dan Amerika Serikat, sehingga menciptakan efek deterensi terhadap aktor non-negara maupun negara yang mengancam stabilitas kawasan.

Pendekatan berbasis kerja sama ini memperlihatkan bagaimana FOIP bukan sekadar proyek unilateral Jepang, melainkan platform inklusif yang berkontribusi terhadap pembentukan norma kawasan mengenai kebebasan navigasi dan keamanan maritim kolektif. Dari perspektif keamanan maritim, hal ini sangat relevan untuk Indonesia yang memiliki perairan luas, rentan terhadap ancaman lintas batas, dan membutuhkan keterlibatan eksternal yang tidak melanggar kedaulatan nasional.

Dukungan terhadap Penegakan Hukum Laut dan Keterlibatan dalam Rezim Internasional

Dimensi ketiga dari kontribusi FOIP Jepang adalah dalam penguatan penegakan hukum laut serta partisipasi Indonesia dalam rezim hukum internasional yang mengatur tata kelola maritim. Jepang secara eksplisit mendukung Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebagai fondasi legal dari FOIP. Dengan demikian, kerja sama Jepang–Indonesia dalam FOIP membawa implikasi positif terhadap posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berkomitmen pada sistem hukum laut internasional.

Sebagai contoh, Jepang mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan mekanisme monitoring terhadap pelanggaran batas wilayah laut melalui pemanfaatan data satelit dan sistem pelacakan otomatis kapal (AIS). Dukungan ini memperkuat kapasitas Indonesia dalam mendeteksi kapal asing yang masuk tanpa izin, serta meningkatkan integrasi data lintas

lembaga seperti TNI AL, Bakamla, KKP, dan Bea Cukai.

Selain itu, FOIP juga mendorong Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum domestik yang terkait dengan pelanggaran di laut, termasuk pengadilan maritim dan pengawasan terhadap praktik ilegal seperti pencurian sumber daya laut dan eksploitasi kawasan konservasi. Jepang juga terlibat dalam program pengembangan hukum laut Indonesia melalui kerja sama antar lembaga penelitian dan universitas, yang menciptakan transfer pengetahuan tentang peradilan maritim dan tata kelola kelautan berkelanjutan.

Partisipasi Indonesia dalam FOIP memperkuat posisinya dalam forum internasional yang membahas kebijakan maritim global. Indonesia kini semakin aktif dalam diplomasi maritim, baik di PBB maupun dalam kerja sama lintas kawasan seperti IORA dan Indo-Pacific Oceans Initiative. Dengan dukungan FOIP, Indonesia mampu menyampaikan agenda kepentingan nasional maritimnya di berbagai forum internasional tanpa terjebak dalam logika blok kekuatan besar.

Refleksi dan Tantangan

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi FOIP tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Di tingkat domestik, terdapat kendala dalam hal koordinasi lintas sektor, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan anggaran dan SDM. Sementara di tingkat regional, Indonesia harus berhati-hati agar kerja sama dengan Jepang tidak dianggap sebagai pengambilan posisi terhadap kekuatan besar lainnya seperti Tiongkok. Oleh karena itu, pendekatan diplomatik Indonesia dalam FOIP harus tetap konsisten dengan prinsip bebas

aktif dan menjaga keseimbangan kepentingan kawasan.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kerja sama teknis dan operasional yang diberikan Jepang benar-benar diserap dan diinternalisasi oleh institusi terkait di Indonesia. Tanpa integrasi kelembagaan yang kuat, potensi FOIP sebagai instrumen penguatan keamanan maritim dapat tidak optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diinisiasi oleh Jepang memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan maritim Indonesia. Dengan menggunakan teori keamanan maritim sebagai kerangka terapan, dapat disimpulkan bahwa FOIP memberikan kontribusi nyata dalam tiga dimensi utama: peningkatan kapasitas keamanan laut, penguatan kerja sama bilateral dan regional, serta dukungan terhadap penegakan hukum laut internasional.

Pertama, dari sisi peningkatan kapasitas, FOIP mendorong penguatan pengawasan perairan Indonesia melalui bantuan kapal patroli, pelatihan teknis untuk aparat penjaga laut, serta penyediaan teknologi pemantauan seperti radar dan sistem pelacakan kapal. Program pelatihan dan hibah dari Jepang memperkuat kemampuan Indonesia dalam menangani ancaman non-tradisional seperti perompakan, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah. Hal ini mendukung pergeseran pendekatan Indonesia dari reaktif menjadi proaktif dalam menjaga wilayah yurisdiksi maritim nasional.

Kedua, FOIP memperkuat jejaring kerja sama keamanan Indonesia baik secara bilateral dengan Jepang maupun

dalam forum regional seperti ASEAN dan ADMM-Plus. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas kapasitas diplomasi pertahanan Indonesia, tetapi juga mendorong sinergi kebijakan keamanan maritim lintas negara. Melalui FOIP, Indonesia terlibat aktif dalam penguatan arsitektur kawasan yang berbasis aturan, terbuka, dan inklusif.

Ketiga, FOIP memperkuat posisi Indonesia dalam penegakan hukum laut internasional, khususnya melalui dukungan terhadap implementasi UNCLOS dan pengembangan kerangka hukum domestik. FOIP juga mendorong partisipasi Indonesia dalam rezim internasional seperti IORA dan Indo-Pacific Oceans Initiative, memperkuat suara Indonesia dalam perumusan norma global terkait keamanan maritim.

Meskipun demikian, efektivitas FOIP dalam konteks Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan koordinasi lintas sektor, sensitivitas geopolitik, serta perlunya internalisasi kelembagaan. Oleh karena itu, keberlanjutan kerja sama dalam kerangka FOIP memerlukan strategi nasional yang sinkron, kapasitas kelembagaan yang kuat, serta pendekatan diplomatik yang fleksibel namun tegas.

Secara keseluruhan, FOIP merupakan instrumen kerja sama strategis yang berdampak positif terhadap keamanan maritim Indonesia, asalkan implementasinya dikelola secara hati-hati, seimbang, dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang. Dengan landasan teoritis yang kuat dan kerangka kerja sama yang jelas, FOIP dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam upaya Indonesia menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta memperkuat peran globalnya sebagai negara maritim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- Collins, A. (2016). *Contemporary Security Studies*. Oxford University Press.
- Duffield, M. (2001). *Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security*. Zed Books.
- Finnemore, M. (2020). *Constructing World Politics: Norms, Institutions, and Global Order*. Princeton University Press.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2019). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford University Press.
- Mearsheimer, J. J. (2022). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.

Jurnal Ilmiah

- Azizah, R. Z. H., Yoedhi, S., & Beni, R. (2023). Sinergi ASEAN Outlook on Indo-Pacific Jepang dengan Free and Open Indo-Pasifik Jepang dalam Bidang Pertahanan untuk Menciptakan Kawasan Indo-Pasifik yang Aman dan Stabil. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 15(1), 87–109.
<https://doi.org/10.31315/jsdk.v15i1.8866>

- Azizah, R. Z. H., Yoedhi, S., & Beni, R. (2023). The National Interests of Indonesia and Japan in the Indo-Pacific Region and the Defense Cooperation of the Two Countries. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(2), 119–132.
<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i2.4376>
- Beckman, R. (2022). The Role of UNCLOS in the Indo-Pacific Maritime Security Framework. *Asian Journal of International Law*, 12(2), 177–193.
- Lim, H. (2025). Economic Impacts of Free and Open Indo-Pacific on Southeast Asia. *Journal of Regional Economics*, 13(2), 88–101.
- Nakamura, T. (2024). The Future of Indo-Pacific Security: Indonesia's Strategic Dilemmas. *International Affairs*, 100(1), 77–92.
- Nakanishi, T. (2025). Strategic Cooperation and Stability in the Indo-Pacific: Japan's Role in the Free and Open Indo-Pacific Initiative. *Journal of International Relations and Security*, 18(2), 112–130.
- Zhang, L. (2024). Navigating the Indo-Pacific: The Importance of Freedom of Navigation for Indonesia. *Journal of Maritime Security*, 16(1), 45–59.

Dokumen Pemerintah dan Laporan Resmi

- ASEAN. (2021). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Report 2020*.
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

- ASEAN. (2023). *ASEAN Maritime Outlook 2023*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/AMO-1.pdf>
- ASEAN Regional Forum Cambodia. (2022). *ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook 2022*. <https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/library/ARF-ASO-2022-book-Final.pdf>
- Bakamla Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2023*. https://bakamla.go.id/uploads/ppid/Final_LKj_Bakamla_RI_2023_Final_LHR_Inspektorat28022024_1.pdf
- Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020–2024*. https://hubla.dephub.go.id/storage/portal/documents/post/12938/rencana_strategis_direktorat_jenderal_perhubungan_laut.pdf
- ICC International Maritime Bureau. (2021). *Piracy and Armed Robbery Against Ships Report 2020*. https://www.icc-ccs.org/reports/2020_Annual_Piracy_Report.pdf
- ICC International Maritime Bureau. (2024). *Piracy and Armed Robbery Against Ships Report 2023*. https://www.icc-ccs.org/reports/2023_Annual_IMB_Piracy_and_Armed_Robbery_Report_live.pdf
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2021*. [kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-laporan-kinerja-kkp-2021.pdf](https://www.kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-laporan-kinerja-kkp-2021.pdf)
- Ministry of Defense of Japan. (2021). *Japan's Role in the Indo-Pacific Maritime Security*.
- Sumber Daring**
- Balance of power | Definition & Examples. (2024, May 25). *Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/balance-of-power>
- Frazier, B., & Longley, R. (2019, January 14). Foreign Policy Definition and Examples. *ThoughtCo*. <https://www.thoughtco.com/foreign-policy-definition-examples-4178057>
- Hellmann, G., & Stark, U. (2013, August 26). Theories of Foreign Policy - International Relations. *Oxford Bibliographies*. <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0104.xml>
- Kvartalnov, A. (2021, September 17). Indivisible Security and Collective Security Concepts: Implications for Russia's Relations with the West. *Central European Journal of International and Security Studies*. <https://cejiss.org/indivisible-security-and-collective-security-concepts-implications-for-russia-s-relations-with-the-west>
- Mihalka, M. (2024). Cooperative Security: From Theory to Practice. *George C. Marshall European Center For Security Studies*. <https://www.marshallcenter.org/en/publications/marshall-center-papers/cooperative-security-new->

[horizons-international-order/cooperative-security-theory-practice](#)

- Oakeshott, M., Blackwell, B., & Oakeshott, M. (2024). *Security in International Relations*. University of London.
<https://www.london.ac.uk/sites/default/files/uploads/ir3140-security-international-relations-study-guide.pdf>
- OECD. (2024). *OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 2*.
<https://doi.org/10.1787/d8814e8b-en>
- University of York. (2022, September 1). What is foreign policy?. *York Online*.
<https://online.york.ac.uk/what-is-foreign-policy/>
- Vision of Humanity. (2021, June 4). *Measuring Peace in a Complex World*.
<https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web-1.pdf>
- Global Initiative. (2023). *The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Risk Index 2023 Update*.
<https://iuufishingindex.net/downloads/IUU-Report-2023.pdf>